



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DRS SOHEL SH
NIK : 1271091006660004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 26 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

1271091006660004

2. Nama

DRS.SOHEL, SH

3. Jenis ID

KTP

4. No. ID

1271091006660004

5. No. Telepon

081284081567

6. Email

malayusohel@gmail.com

7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP Suami/Istri

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1

a

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)

2

462.147.300

b

1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

1

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c)

3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

462.147.300

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

462.147.300

5

Penghasilan tidak kena pajak

K/2 = 67.500.000

67.500.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

394.647.000

7

PPh terutang

67.661.750

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

67.661.750

D. KREDIT PAJAK

10

a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

67.661.750

b

Angsuran PPh Pasal 25

0

c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

0

d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

